



**RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA LANGSA
TAHUN 2023-2026**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA LANGSA TAHUN 2023 - 2026

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun				Program Pembangunan	Kegiatan/ Sub kegiatan	OPD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026			
							Tahun 2023		
I	Pengendalian Kuantitas Penduduk								
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,4	1,4	1,4	Program pengendalian penduduk	1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	Persen	69	70	72	78	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan mitra	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak,

								<p>kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE (Program KKBPK) - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK <p>2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB - Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) <p>3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi</p>	Pengendalian Penduduk dan KB
--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------------

								<p>Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB <p>4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB <p>1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

3.	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan Keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	100	100	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
II	Peningkatan Kualitas Penduduk								
1.	Persentase pelanggaran Qanun syariat islam yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	Program Syariat Islam	1. Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyebaran Syariat Islam 	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

2.	Peran serta Dayah dalam pendidikan Islam	Dayah	100	100	100	100	Program Pendidikan Dayah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama <p>2. Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman <p>3. Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan syariat islam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam <p>1. Pengelolaan Pendidikan Dayah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah - Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah 	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
----	--	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------------	--	--

3.	Eksistensi Peran Ulama dalam pembangunan Daerah	Gampong	66	66	66	66	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	<p>1. Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Kader Ulama - Muzakarah Masalah Keagamaan - Pengkajian Aliran Sempalan - Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam - Kajian Pedoman Keagamaan 	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Persen	11,32	11,42	11,62	11,62	Program Pengelolaan Pendidikan	<p>1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Ruang Kelas Baru - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Pembangunan Perpustakaan Sekolah - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

								<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - Pengadaan Mebel Sekolah - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar <p>2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - Penambahan Ruang Kelas Baru - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Pembangunan Perpustakaan 	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								Sekolah <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula - Pembangunan Asrama Sekolah - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga sekolah - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pengadaan Mebel Sekolah - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Pembinaan Minat, Bakat dan 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>Kreativitas Siswa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama <p>3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - Pengadaan Mebel PAUD - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>Manajemen PAUD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Dana BOP PAUD <p>4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan - Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal /Kesetaraan - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan <p>1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar <p>2. Penetapan Kurikulum Muatan</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.	Tingkat Implementasi Kurikulum dalam sistem belajar mengajar sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Program pengembangan kurikulum	<p>Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal - Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal <p>1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Bahan Pustaka <p>2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat <p>1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
----	---	--------	-----	-----	-----	-----	--------------------------------	---	---------------------------------

6.	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Kunjungan	11.500	13.000	14.500	16.000	Program Pembinaan Perpustakaan	<p>Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota <p>1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha pemula - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat 	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nilai	650	750	750	750	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha pemula - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat 	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan

8.	Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persen	65,00	70,00	75,00	75,00	Program Pengembangan kpasitas daya saing kepemudaan	Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
----	--------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

9.	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 Anak	Persen	3,52	3,50	3,00	2,50	Program Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
----	---	--------	------	------	------	------	----------------------------------	--	--

								<p>1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota <p>2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota <p>3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Sumber 	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

10.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data Gender dan Anak	persen	55,00	55,00	65,00	75,00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	<p>Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
11.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Ratio	0,048	0,046	0,045	0,044	Program perlindungan perempuan	<p>2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar <p>3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Mutu dan 	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

13.	SDM Kesehatan yang Tersertifikasi	Persen	94,00	95,00	96,00	97,00	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	<p>Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <p>1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) <p>2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri 	Dinas kesehatan
-----	-----------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	---	--	-----------------

14.	Tingkat ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, makanan	Persen	95,00	96,00	97,00	98,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	<p>Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 	Dinas kesehatan
-----	---	--------	-------	-------	-------	-------	---	--	-----------------

	dan minuman sesuai standar Kesehatan							<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah <p>1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD <p>2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</p>	
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

15.	Cakupan Pelaksanaan Germas	Persen	60,00	70,00	80,00	90,00	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan <p>3. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 	Dinas kesehatan
16.	Terwujudnya ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya Daerah	Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	<p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

17.	Terkendalinya Aktivitas Perekonomian Daerah	Persen	91,00	92,00	94,00	96,00	Program Perekonomian dan Pembangunan	<p>SPAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan <p>1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang <p>2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota <p>1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p>	Sekretariat Daerah Kota Langsa
-----	---	--------	-------	-------	-------	-------	--------------------------------------	---	--------------------------------

18.	Persentase rumah tangga yang memiliki Akses Air Minum Layak	Persen	100	100	100	100	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air minum	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Fasilitasi Bantuan Hukum - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum <p>1. Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh <p>1. Penyelenggaraan Penataan Desa</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
-----	---	--------	-----	-----	-----	-----	--	---	---

19.	Pengawasan dukungan penanganan PMKS	Persen	100	100	100	100	Program Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 	Dinas Sosial
20.		Persen	100	100	100	100			Sekretariat Daerah

21.	<p>Pemenuhan Kebutuhan Publik dan Sosial Masyarakat</p> <p>Saran MPD yang dijadikan kebijakan daerah</p>	Persen	15,00	15,00	20,00	20,00	<p>Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat</p> <p>Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga <p>1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD - Fasilitasi Penetapan dan 	<p>Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)</p> <p>Dinas</p>
-----	--	--------	-------	-------	-------	-------	---	--	---

22	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Efektif	Gampong	66	66	66	66	Program Penataan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penegasan Batas Desa - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 	Pemberdayaan Masyarakat Gampong
23.	Partisipasi dan Pelayanan Penyelenggaraan Masyarakat Desa	Persen	100	100	100	100	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong

24.	Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	Program Administrasi Pemerintahan Desa	<p>Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
-----	---------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	--	---	---------------------------------------

25.	Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan 	Kec.Langsa Timur Kec.Langsa lama Kec.Langsa Barat Kec.Langsa Baro Kec.Langsa Kota
-----	---	--------	-----	-----	-----	-----	--	---	---

28.	Peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan Daerah	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> Bencana Kabupaten/Kota - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah 	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Kebangsaan</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Kebangsaan</p>
29.	Ancaman/ Deteksi dini konflik yang tertangani	Persen	100	100	100	100	Program peningkatan kewaspadaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah 	Badan Kesatuan Bangsa dan Kebangsaan

							nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kabupaten/Kota - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 3. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan	
30.	Cakupan pengelolaan sampah	Persen	81,00	82,00	83,00	84,00	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		Dinas Lingkungan Hidup

31.	Cakupan penanggulangan kejadian bencana	Persen	100	100	100	100	Program Penanggulangan bencana	<p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi <p>1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan <p>2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana <p>1. Rencana Perlindungan dan</p>	Badan penanggulangan bencana daerah Kota Langsa
-----	---	--------	-----	-----	-----	-----	--------------------------------	---	---

32.	Cakupan Penanggulangan kejadian Bencana kebakaran dan penyelamatan non	Persen	100	100	100	100	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan	<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota <p>2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup <p>1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 	Badan penanggulangan bencana daerah Kota Langsa
-----	--	--------	-----	-----	-----	-----	--	--	---

	kebakaran						kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim <p>2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi <p>1. Penyimpanan sementara Limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 <p>2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, 	
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

								Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
								<p>1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup <p>1. Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 	
33.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	Program penanganan bencana		Badan penanggulangan bencana daerah Kota Langsa

34.	Terkendalinya kualitas lingkungan hidup	Persen	73,00	75,00	77,00	79,00	Program perencanaan lingkungan hidup		Dinas Lingkungan Hidup
-----	---	--------	-------	-------	-------	-------	--------------------------------------	--	------------------------

34.	Penurunan Beban pencemaran	Persen	5,00	5,00	5,00	5,00	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup		Dinas Lingkungan Hidup
-----	----------------------------	--------	------	------	------	------	---	--	------------------------

35.	Penanggulangan pencemaran B3	Persen	30,00	30,00	30,00	30,00	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
36.	Desa berbudaya lingkungan hidup	Gampong	13	13	13	14	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan	Dinas Lingkungan Hidup

37.	Persentase penanganan sampah	Persen	81,00	82,00	83,00	84,00	penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Program pengelolaan persampahan		Dinas Lingkungan Hidup
III	Pembangunan Keluarga								
1.	Persentase pusat pembelajaran Keluarga (Puspaga) sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian

								<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota <p>2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <p>1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>	Penduduk dan KB
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

2.	Cakupan wilayah Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya - Pembangunan Puskesmas - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Obat, Vaksin - Pengadaan Bahan Habis Pakai - Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan kesehatan - Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat 	Dinas Kesehatan
----	--	--------	-----	-----	-----	-----	---	--	-----------------

								<p>Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>Gangguan Jiwa Berat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan 	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat - Operasional Pelayanan Rumah Sakit - Operasional Pelayanan Puskesmas - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan <p>3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan <p>1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.	Jumlah produksi Perikanan tangkap	Ton	61264	65.567	69.885	74,207	Program Pengelolaan perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan - Pendidikan dan Pelatihan 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat 1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan perikanan
----	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------	--------	---------------------------------------	---	---

4.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	29.655	31.784	33.413	36.103	Program pengelolaan Perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang <p>2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan perikanan
5.	Pengawasan Dukungan Penanganan PMKS	Persen	100	100	100	100	Program pemberdayaan Sosial	<p>1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Alat Bantu - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 	Dinas Sosial

6.	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	86,00	87,00	88,00	89,00	Program Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - Pemberian Layanan Rujukan <p>2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota <p>1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar - Rujukan Anak-Anak Terlantar - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 	Dinas Sosial
----	---------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-----------------------------	--	--------------

7.	Meningkatnya Kemandirian Keluarga Miskin dan Rentan dalam mengakses kebutuhan dasar	Persen	25,00	30,00	35,00	40,00	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<p>2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat <p>1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi <p>1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui</p>	Dinas Sosial
----	---	--------	-------	-------	-------	-------	---	--	--------------

8.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	46,00	47,00	48,00	49,00	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	<p>Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) 	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
----	---------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

9.	Persentase Usaha Menengah, usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
10.	Jumlah Produksi hasil Olahan Perikanan	Ton	23,00	23,50	24,00	24,50	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan perikanan

11.	Produktivitas Pertanian/ Perkebunan	Ton/Ha	2,90	2,91	2,92	2,93	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	<p>dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain <p>1. Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya <p>2. Pembangunan Prasarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya <p>1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa <p>1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan</p>	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan perikanan
-----	-------------------------------------	--------	------	------	------	------	--	--	---

12.	Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan	Persen	0,35	0,34	0,34	0,34	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	<p>Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis <p>1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya <p>1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan perikanan
-----	--	--------	------	------	------	------	---	---	---

13.	Pertumbuhan Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	4,10	4,10	4,10	4,10	Program penyuluhan Pertanian	<p>2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per tahun 	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan perikanan
14.	Perlindungan Hewan dan penyakit yang mengancam kelestarian sumberdaya hewan dan lingkungan	Persen	30,00	40,00	45,00	50,00	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	<p>1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan <p>2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan perikanan
15.	Desa Mandiri Pangan	Gampong	1	1	1	1	Program Pengelolaan Sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	<p>1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan <p>2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan perikanan
16.		Skor	86,50	88,00	88,50	90,50			Dinas Pangan, Pertanian,

	<p>Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)</p>						<p>Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</p>	<p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan <p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah 	<p>Kelautan dan perikanan</p> <p>Dinas Pangan,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17.	Cakupan penanganan Daerah rawan pangan	Persen	100	100	100	100	Program penanganan kerawanan pangan	<p>Terpusat Skala Permukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 	Pertanian, Kelautan dan perikanan
18.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Persen	100	100	100	100	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf <ul style="list-style-type: none"> Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif fakir 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

19.	Rumah tangga bersanitasi	Persen	71,97	76,97	81,97	86,97	Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin - Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ami - Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf - Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin - Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah - Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil - Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20.	Persentase korban bencana Alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	Program penanganan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 2. Pemberdayaan Perempuan 	Dinas Sosial

21.	Tingkat capaian penyaluran zakat	Persen	100	100	100	100	Program Baitul Mal	<p>Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 	Sekretariat Baitul Mal
-----	----------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	--------------------	--	------------------------

22.	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Sudah (1)/ Belum (0)	1	1	1	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
IV	Persebaran dan Mobilitas Penduduk								

1.	Panjang jalan dalam kondisi baik	Km	535	542	551	559	Program penyelenggaraan jalan	<p>1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan jalan - Survey Kondisi Jalan/Jembatan - Pembangunan Jalan - Pelebaran Jalan Menuju Standar - Rekonstruksi Jalan - Rehabilitasi Jalan - Pemeliharaan Rutin Jalan - Pembangunan Jembatan - Pelebaran Jembatan - Rehabilitasi Jembatan - Pemeliharaan Rutin Jembatan <p>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota <p>2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Angka Kecelakaan Lalu lintas	LAKA	95	90	85	80	Program penyelenggaraan lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota <p>2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p>	Dinas Perhubungan

3.	Tertibnya arus lalulintas pelayaran	Persen	100	100	100	100	Program pengelolaan pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 1. Penetapan Rencana Tata 	Dinas Perhubungan
----	-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-------------------------------	---	-------------------

4.	Tingkat kepatuhan IMB	Persen	99,00	99,00	99,00	99,00	Program penyelenggaraan Penataan Ruang	<p>Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang <p>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota <p>3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
----	-----------------------	--------	-------	-------	-------	-------	--	---	---

5.	Persentase ketersediaan Infrasrtuktur SDA	Persen	50,00	51,00	52,00	53,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Informasi Penataan Ruang 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air lainnya - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
----	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------------------------------------	--	---

	dalam kondisi baik						(SDA)	<p>Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Unit Air Baku - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali banjir - Pembangunan Kanal Banjir - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali banjir - Peningkatan Tanggul sungai - Normalisasi/Restorasi sungai <p>2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan - Peningkatan Jaringan Irigasi permukaan - Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan 	
--	--------------------	--	--	--	--	--	-------	---	--

6.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Persen	100	100	100	100	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan	<p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan <p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan <p>1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
----	---	--------	-----	-----	-----	-----	--	--	---

							air minum		
7.	Lancarnya Sistem Drainase Perkotaan	Persen	82,24	87,24	92,24	97,24	Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	<p>Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota <p>1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten/Kota - Penataan Bangunan dan Lingkungan 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	Permukiman Perkotaan yang layak huni	Persen	83,00	88,00	93,00	98,00	Program pengembangan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kabupaten/Kota - Penataan Bangunan dan Lingkungan 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

9.	Persentase terkendalinya bangunan gedung dan lingkungannya	Persen	60,00	62,00	65,00	68,00	Program penataan bangunan dan lingkungannya	<p>1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG <p>1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
----	--	--------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

10.	Persentase penyelenggaraan kualitas bangunan gedung	Persen	40,00	45,00	50,00	55,00	Program penataan bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota <p>1. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota <p>2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11.	Persentase rumah layak huni	Persen	85,30	85,50	85,80	86,00	Program pengembangan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Rumah Khusus - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) <p>1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Penyediaan PSU 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

12.	Persentase Lingkungan kumuh	Persen	11,00	10,50	10,00	9,50	Program kawasan permukiman	<p>Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan <p>1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota - Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS - Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS - Peningkatan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS - Penyediaan Sarana Persampahan <p>1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan</p>	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
-----	-----------------------------	--------	-------	-------	-------	------	----------------------------	---	-------------------------------------

13.	Persentase permukiman yang mendapat dukungan PSU	Persen	55,00	52,00	54,00	56,00	Program peningkatan Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	<p>Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim <p>2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitas 	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Terkendalnya kualitas lingkungan hidup	Persen	73,00	75,00	77,00	79,00	Program Perencanaan Lingkungan hidup	<p>1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) <p>1. Penyimpanan sementara Limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Lapangan untuk 	Dinas Lingkungan Hidup

15.	Penurunan beban pencemaran	Persen	5,00	5,00	5,00	5,00	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<p>Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3</p> <p>2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan <p>1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <p>1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan</p>	Dinas Lingkungan Hidup
-----	----------------------------	--------	------	------	------	------	---	---	------------------------

16.	Tingkat kepedulian stakeholder dalam upaya pelestarian kehati	Persen	26,00	26,00	26,00	26,00	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	<p>Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup <p>1. Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota <p>1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 	Dinas Lingkungan Hidup
17.	Penanggulangan Pencemaran B3	Persen	30,00	30,00	30,00	30,00	Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota <p>1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 	Dinas Lingkungan Hidup

18.	Tingkat Ketaatan kegiatan Usaha terhadap Regulasi	Persen	26,00	27,00	27,00	28,00	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
19.	Desa Berbudaya Lingkungan Hidup	Gampong	13,00	13,00	13,00	14,00	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Dinas Lingkungan Hidup
20.	Persentase Penanganan Sampah	Persen	81,00	82,00	83,00	84,00	Program Pengelolaan	4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Dinas Lingkungan Hidup

22.	Cakupan	Persen	100	100	100	100		<p>Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</p> <p>3. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi <p>1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah</p>	Badan
-----	---------	--------	-----	-----	-----	-----	--	---	-------

	<p>Penanggulangan kejadian bencana kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</p>						<p>Program Pencegahan Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</p>	<p>Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada <p>2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p>	<p>penanggulangan Bencana Daerah</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

23.	Jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan	Pelanggaran	100	150	200	250		<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota <p>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Koordinasi di 	Satuan Polisi Pamong Praja dan
-----	---	-------------	-----	-----	-----	-----	--	---	--------------------------------

	Keindahan)						Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	<p>Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 	Wilayatul Hisbah
--	------------	--	--	--	--	--	---	---	------------------

24.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman di Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota <p>2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi <p>1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan <p>1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</p>	Kecamatan Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama dan Langsa Baro
-----	---	--------	-----	-----	-----	-----	--	---	--

25.	Ancaman/ Deteksi dini konflik yang tertangani	Persen	100	100	100	100	Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil	Persen	4,21	4,34	4,38	4,47			Dinas Perindustrian,

	dan Sepeda motor						Program peningkatan Sarana distribusi perdagangan		Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
27.	Laju Indeks Implisit PDRB	Persen	2,95	2,80	2,85	2,75	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

28.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	Persen	5,00	5,00	5,00	5,00	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
29.	Persentase masyarakat/Penduduk yang terlindungi dari dampak negatif pemakaian barang dan jasa Penggunaan dan	Persen	95,15	95,15	95,35	95,50	Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

30.	kontribusi Produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional	Persen	94,00	94,00	94,00	94,00	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
V	Data dan Informasi Kependudukan								
1.	Pencatatan Biodata Penduduk dalam register Pencatatan sipil yang didaftarkan	Persen	100	100	100	100	Program pendaftaran penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk dalam register pencatatan sipil yang dilaporkan	Persen	100	100	100	100	Program pencatatan sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.	Tingkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<p>Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil</p> <p>1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 	Dinas kependudukan dan Pencatan Sipil
4.	Pemutakhiran data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	<p>1. Penyusunan Profil Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 	Dinas kependudukan dan Pencatan Sipil
5.	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Persen	5,18	7,77	9,33	10,36	Program Penempatan Tenaga Kerja	<p>1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan Kesempatan Kerja <p>2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online <p>1. Pengesahan Peraturan</p>	Dinas Ketenagakerjaan

6.	Menurunnya tingkat perselisihan hubungan industrial	Persen	28,00	25,00	20,00	18,00	Program Hubungan Industrial	<p>Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan <p>2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Ketenagakerjaan
----	---	--------	-------	-------	-------	-------	-----------------------------	---	-----------------------